

STUDI EVALUASI PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO

Zuriati Muhamad, Rona Febriyona

**Universitas
Muhammadiyah Gorontalo**

Abstrak

Program Jampersal merupakan Program Pemerintah untuk menurunkan AKI dan AKB sesuai dengan target MDG's, dengan harapan meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan, meningkatkan cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan, meningkatkan cakupan pelayanan KB pasca persalinan, meningkatkan cakupan penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Data dikumpulkan melalui *focus group discussion* (FGD) dan Indepth Interview (Wawancara Mendalam). Penelitian ini dilakukan terhadap ibu bersalin yang menggunakan jampersal, ibu bersalin yang tidak menggunakan jampersal, bidan yang terlibat dalam pelayanan Jampersal, dan kepala bagian Promosi Kesehatan/Pengelola program Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar ibu bersalin merasakan kepuasan pada saat bersalin program Jampersal di bidan NP dan RD. Berdasarkan hasil wawancara dengan bidan Desa dan Bidan Praktek Swasta (BPS) yang berjumlah 10 orang, 8 bidan telah termotivasi dan telah melaksanakan program jampersal yang merupakan program pemerintah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Kepala Bagian Promosi Kesehatan/pengelola program jampersal di Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo mengatakan bahwa Program Jampersal merupakan Program Pemerintah Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 yang diciptakan oleh pemerintah sebagai bentuk dari tanggung jawab pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dibidang kesehatan Untuk mencapai program MDGs Point ke-4 dan ke-5. Dinas Kesehatan perlu melakukan suatu supervisi sebagai upaya untuk memberikan pembinaan dan pengarahan dalam pelaksanaan Jampersal kepada bidan sekaligus mendengarkan keluhan tentang masalah pelaksanaan jampersal dan memberikan petunjuk serta saran dalam mengatasi masalah. Supervisi dilakukan untuk melihat kendala-kendala yang dihadapi bidan dalam pelaksanaan jampersal.

Kata Kunci : Program Jaminan Persalinan, Evaluasi.

PENDAHULUAN

Kesehatan Ibu dan Anak menjadi target dalam tujuan pembangunan *Milenium Development Goals* (MDGs), tepatnya pada tujuan 4 dan 5 yaitu menurunkan Angka Kematian Anak dan Meningkatkan Kesehatan Ibu.

Program Kesehatan Ibu dan Anak menjadi sangat penting karena ibu dan anak merupakan unsur penting pembangunan, hal ini mengandung pengertian bahwa dari seorang ibu akan dilahirkan calon-calon penerus bangsa maka diupayakan kondisi ibu dan anak dalam kondisi sehat. (Arsita, 2012).

Menurut Data Riskesdas 2012 persalinan oleh tenaga kesehatan

pada kelompok sasaran miskin baru mencapai 69,3% sedangkan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan baru mencapai 55,4%. Salah satu kendala penting yang dihadapi masyarakat untuk mengakses persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan adalah keterbatasan dan ketidaktersediaan biaya. Hal ini menyebabkan banyak persalinan ditolong oleh tenaga non kesehatan dan dilakukan tidak di fasilitas kesehatan, sehingga untuk meningkatkan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dan untuk menurunkan AKI dari 228 per 100.000 dari kelahiran pada tahun 2007 menjadi 102 per 100 kelahiran pada tahun 2015 diperlukan berbagai

upaya terobosan, yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap persalinan yang sehat, untuk itu pemerintah berupaya memberikan kemudahan pembiayaan melalui program yang dinamakan dengan Jaminan Persalinan.

Menurut Data Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo program Jampersal yang telah di anggarkan seharusnya sudah ada perencanaan secara matang, namun program yang seharusnya sudah berjalan sejak Januari 2011 baru terlaksana di Kabupaten Gorontalo pada bulan Agustus 2011 dengan alokasi dana Rp. 2.992.557.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan jumlah sasaran sebanyak 2.776 ibu hamil, dana tersebut disalurkan ke dua puluh satu puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo. Kemudian pada tahun 2012 alokasi dana jampersal meningkat menjadi Rp 4.006.867.000 (Empat Milyar Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan jumlah sasaran sebanyak 3.406 ibu hamil dengan Besarana dana terserap sebesar 60% artinya untuk pelaksanaan jampersal pada tahun 2011 tersisa dana sebesar Rp. 1.093.805.901 (Satu Milyar Sembilan Puluh Tiga Delapan Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah) atau sebesar 40% dana dikembalikan ke kas Negara dan pada tahun 2012 dana terserap Rp. 3.358.416.400 atau sebesar 77,5% dan dikembalikan ke kas negara 22,5% atau senilai Rp. 684.450.600 (Enam Ratus Delapan Puluh Empat Empat Ratus Lima Puluh Enam Ratus Rupiah) (Dinkes Kab. Gorontalo 2012).

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan kepada pengelola program Jampersal beserta beberapa bidan koordinator dan bidan desa yang berada di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo mengatakan bahwa masih banyak kendala-kendala yang dihadapi yaitu masih banyak warga belum mengerti

dengan jelas prosedur bagaimana mendapat layanan jampersal, masalah bidang pelayanan (sistem rujukan yang belum berjalan dengan optimal), kendala dalam pendanaan (yakni ketetapan waktu pengiriman klaim, besaran klaim yang dibayarkan ke bidan serta proses verifikasi yang panjang dan berbelit-belit, adanya pengembalian dana ke kas negara sebanyak Rp. Rp. 684.450.600 (Enam Ratus Delapan Puluh Empat Empat Ratus Lima Puluh Enam Ratus Rupiah), (Dinkes Kab. Gorontalo 2012). Dengan berbagai permasalahan dan hasil penelitian sebelumnya yang mendukung maka penelitian ini dilakukan untuk melakukan Studi Evaluasi terhadap program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo tahun 2012–2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi atau mendeskripsikan faktor penghambat pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Tahun 2012-2013.

BAHAN DAN METODE

Lokasi dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kondisi objek alamiah (*natural setting*). Metode Penelitian Kualitatif ini memberikan tehnik untuk memperoleh jawaban atau informasi mendalam tentang pendapat dan perasaan seseorang (Sugiyono,2008).

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah ibu bersalin yang menggunakan jampersal,ibu bersalin yang tidak menggunakan jampersal, para bidan yang terlibat dalam pelayanan jampersal, dan dari Kepala Bidang Promsoi Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Gorontalo yang membawahi program Jaminan Persalinan.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu Wawancara Mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara, serta menggunakan Metode *Focus Group Discussion* (FGD). Dengan Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan dilengkapi dengan *Tape Recorder*, Pedoman Wawancara, Catatan Harian.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data menurut Milles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2012) dan teknik ini yang digunakan oleh peneliti, diterapkan melalui tiga alur, yaitu reduksi data (*Data Reduction*), *Data Display* atau penyajian data dan *Conclusion Drawing/Verification* atau pencarian makna dan kata kunci peristiwa.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah ibu pengguna jampersal lebih sedikit dibandingkan dengan ibu non-jampersal. sesuai dengan data Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo yaitu perbandingannya 2:3. Sebagian besar responden belum menggunakan jampersal menjelaskan bahwa mereka belum mengetahui tentang adanya program jampersal pada tahun 2011 sampai dengan 2013, malah saat ini mereka juga belum mengetahui kalau program jampersal pada Januari 2014 sudah di ganti dengan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Sedangkan 3 ibu mengaku pada waktu itu mereka belum memenuhi persyaratan untuk mengikuti jampersal sehingga mereka tidak dapat mengikuti program ini. Adanya Jaminan Kesehatan lain yang diikuti oleh ibu yaitu Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) yang menyebabkan 3 ibu menolak untuk menggunakan jampersal.

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Kepuasan Pelayanan Program Jampersal

Data dari hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar ibu bersalin merasakan kepuasan pada saat bersalin program Jampersal di bidan NP dan RD. Hal ini bisa dilihat dengan kelengkapan fasilitas-fasilitas, kebersihan, kerapian, kenyamanan ruangan, persiapan, kebersihan alat, kebersihan penampilan petugas dan sikap petugas/bidan yang baik yang membuat ibu merasa nyaman untuk bersalin pada program Jampersal. Bidan telah memberikan pelayanan yang terbaik yaitu melakukan ANC ≥ 4 kali selama kehamilan, membantu persalinan dengan menerapkan 58 langkah APN (Asuhan Persalinan Normal) dan prosedur untuk bersalin di tempat praktek bidan dapat dilakukan dengan mudah dan jelas.

Setelah bersalin bidan melakukan kunjungan rumah sebanyak 2 kali pada masa nifas dan menganjurkan dan memasang alat Kontrasepsi pada ibu hamil pasca bersalin. namun kendala yang dihadapi adalah keberadaan bidan ditempat praktek kadang ada kadang tidak ada, namun alah satu responden mengatakan bahwa keberadaan bidan NP di tempat selalu ada. Hal ini membuktikan bahwa masih ada pasien yang kurang puas dengan keberadaannya bidan kadang ada dan kadang tidak ada.

2. Persepsi Bidan Terhadap Program Jampersal

Berdasarkan hasil wawancara dengan bidan Desa dan Bidan Praktek Swasta (BPS) yang berjumlah 10 orang, 8 bidan telah termotivasi dan telah melaksanakan program jampersal yang merupakan program pemerintah tersebut, dua BPS yang belum melaksanakan program jampersal tersebut dengan alasan program jampersal tidak diwajibkan, tarif jampersal rendah dibandingkan dengan harga di tempat praktek, dan klaim pembayaran cukup lama. sesuai Petunjuk

Teknis (Juknis) jampersal bahwa di dalam juknis hanyalah petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di Kab/Kota yaitu indikator keberhasilan kinerja program, indikator kinerja pendanaan dan tata kelola keuangan, tidak disebutkan bahwa bidan diwajibkan untuk ikut Praktek Klinik Swasta (PKS). Dalam upaya mendukung program Pemerintah seharusnya BPS mau melakukan PKS Swasta, walaupun dalam juknis jampersal tidak mewajibkan BPS untuk melakukan PKS, namun seharusnya program Jampersal didukung BPS dalam rangka membantu program pemerintah dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Bidan Praktek Swasta (BPS) untuk melakukan Jampersal dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo masih rendah, terutama bagi BPS yang kunjungan pasien banyak dari segi pelayanan akan timbul kekhawatiran akan meningkatnya pasien sehingga mereka harus menyiapkan tenaga yang memberikan pelayanan dari tahap ANC sampai dengan Pelayanan KB, fasilitas yang memadai, alat-alat kesehatan yang menunjang sedangkan administrasi untuk klaim yang rumit karena harus melengkapi syarat administrasi untuk klaim. Sedangkan tarif Jampersal masih sangat rendah jauh berbeda dari tarif di tempat praktik mereka dan mengharapkan tarif jampersal dinaikkan.

3. Persepsi Kepala Bagian Promosi Kesehatan /Pengelola Program Jampersal Terhadap Program Jampersal

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Kepala Bagian Promosi Kesehatan/pengelola program jampersal di Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo mengatakan bahwa Program Jampersal merupakan Program Pemerintah Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 yang diciptakan oleh pemerintah sebagai bentuk dari tanggung jawab pemerintah

dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dibidang kesehatan Untuk mencapai program MDGs Point ke-4 dan ke-5. Oleh karenanya jampersal dimaksudkan untuk memberikan pembiayaan pemeriksaan dari kehamilan persalinan masa nifas dan pelayanan KB. Melalui Program Jampersal diharapkan hambatan biaya bagi ibu untuk mengakses fasilitas dan tenaga kesehatan terpecahkan sehingga angka kematian ibu dan anak menurun.

Menurut kabag Promkes banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo untuk mensukseskan program jampersal tersebut yakni mulai dari sosialisasi yang gencar dilakukan di 21 Puskesmas di wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo baik pada para bidan desa dan BPS dan masyarakat. Sebagian besar Bidan yang mau bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan Program Jampersal ada beberapa BPS yang tidak mau melaksanakan program jampersal tersebut. Bidan merasa tarif biaya untuk jampersal rendah dibandingkan dengan biaya di tempat praktek mereka, namun jangan lupa kata Kabag Promkes “ Kita ini petugas Kesehatan Pelayan masyarakat,kita sudah digaji oleh Negara oleh karenanya seorang bidan sudah seharusnya menjalankan tugasnya yaitu melayani ibu hamil dan bersalin bukan hanya dilihat dari besarnya imbalan”.

Demikian Pula masih banyak masyarakat yang tidak mau menggunakan program ini, padahal program ini sangat menguntungkan ibu karena biayanya gratis mulai dari pemeriksaan kehamilan, persalinan, nifas perawatan Bayi Baru Lahir dan pelayanan KB pasca persalinan.

Menurut beliau Klaim dana Jampersal oleh bidan baik bidan di Puskesmas dan BPS dilaksanakan di Dinas Kesehatan yaitu tiap bidan koordinator yang berada di Puskesmas memasukan

rekapan biaya dan disetor di pengelola program Jampersal, yang menjadi kendala selama ini adalah pencairan dana klaim yang memakan waktu lama lebih dari triwulan. Hal ini disebabkan Dinas Kesehatan dalam hal ini pengelola Program harus menunggu Pemasukan biaya Klaim dari Puskesmas lainnya yaitu minimal satu kali klaim lima sampai dengan tujuh bahkan dua belas Puskesmas yang telah memasukan dana klaim tersebut. Selanjutnya dana klaim tersebut diajukan di Kas Daerah dan menunggu proses kurang lebih satu bulan dana Jampersal tersebut cair. Namun Alhamdulillah kata beliau seluruh biaya klaim yang diajukan oleh bidan terbayarkan semuanya.

PEMBAHASAN

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Kepuasan Pelayanan Program Jampersal

Hasil wawancara pada hasil di atas menunjukkan bahwa ibu yang tidak menggunakan Jampersal karena kurang mengetahui tentang program dari pemerintah tersebut, supaya program Jampersal dapat berjalan dengan baik maka perlu dilakukan sosialisai terlebih dahulu kepada seluruh pihak terkait dan masyarakat. Kemudian dalam pelaksanaannya pihak-pihak yang terlibat harus melakukan sosialisasi dengan baik kepada publik, agar masyarakat dan para pelaksana program Jampersal dapat memahami dan mematuhi prosedur pelayanan kesehatan program jampersal, sehingga program tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Ibu yang menggunakan Jampersal 4 orang yang semuanya memiliki akses geografis yang memudahkan mereka dalam memanfaatkan pelayanan Jampersal, di mana tempat tinggal mereka berdekatan dengan tempat pelayanan kesehatan. Jarak rumah dengan tempat persalinan kurang dari 5 km, sedangkan pada ibu non jampersal jarak tempat tinggal dengan pelayanan kesehatan tergolong

jauh yakni lebih dari 5 km. Alat transportasi yang digunakan oleh responden pada dua kelompok pengguna jampersal dan non jampersal yaitu sepeda motor dan bentor (Becak Motor).

1. Persepsi Bidan Terhadap Program Jampersal

Bidan merupakan salah satu tenaga profesional yang mempunyai wewenang memberikan pertolongan persalinan dalam program kesejahteraan ibu dan anak (KIA). Pelayanan yang diberikan oleh seorang bidan adalah pelayanan yang profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dalam kurun waktu masa reproduksi dari bayi baru lahir (Menkes RI, 2007).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bidan Desa dan Bidan Praktek Swasta (BPS) yang berjumlah 10 orang, 8 bidan telah termotivasi dan telah melaksanakan program jampersal yang merupakan program pemerintah tersebut, dua BPS yang belum melaksanakan program jampersal tersebut dengan alasan program jampersal tidak diwajibkan, tarif jampersal rendah dibandingkan dengan harga di tempat praktek, dan klaim pembayaran cukup lama. sesuai Petunjuk Teknis (Juknis jampersal bahwa di dalam juknis hanyalah petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di Kab/Kota yaitu indikator keberhasilan kinerja program, indikaor kinerja pendanaan dan tata kelola keuangan, tidak disebutkan bahwa bidan diwajibkan untuk ikut Praktek Klinik Swasta (PKS). Dalam upaya mendukung program Pemerintah seharusnya BPS mau melakukan PKS Swasta, walaupun dalam juknis jampersal tidak mewajibkan BPS untuk melakukan PKS, namun seharusnya program Jampersal didukung BPS dalam rangka membantu program pemerintah dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Sumber daya kesehatan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan harus tetap melaksanakan fungsi dan tanggung-jawab sosialnya sebagai mitra Pemerintah dengan memperhatikan golongan masyarakat yang kurang mampu dan tidak hanya semata-mata mencari keuntungan.

Bagi bidan yang telah mengikuti program jampersal sebagian besar mengatakan bahwa

mereka mau ikut serta dalam program Jampersal karena itu merupakan program pemerintah namun ada beberapa hal yang menjadi kendala yaitu terkesan ribet baik dalam mengumpulkan data pasien/ibu selama kehamilan sampai dengan persalinan belum ditambah lagi dengan penggandaan data dan lamanya waktu untuk verifikasi data dan klaim pembayaran yang memakan waktu lama, dalam Juknis Jampersal Klaim pembayaran dibayarkan setiap triwulan namun pada kenyataan dilapangan klaim pembayaran memakan waktu lebih dari triwulan. Hal ini menjadi dilematis bagi para bidan disatu sisi harus melayani pasien jampersal yang begitu banyak namun dilayani sisi prosedur dan klaim danaya begitu lama sehingga bidan merasa kurang termotivasi dalam melaksanakan program Jampersal.

Bidan Praktek Swasta (BPS) untuk melakukan Jampersal dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo masih rendah, terutama bagi BPS yang kunjungan pasien banyak dari segi pelayanan akan timbul kekhawatiran akan meningkatnya pasien sehingga mereka harus menyiapkan tenaga yang memberikan pelayanan dari tahap ANC sampai dengan Pelayanan KB, fasilitas yang memadai, alat-alat kesehatan yang menunjang sedangkan administrasi untuk klaim yang rumit karena harus melengkapi syarat administrasi untuk klaim.. Sedangkan tarif Jampersal masih sangat rendah jauh berbeda dari tarif di tempat praktik mereka dan mengharapakan tarif

jampersal dinaikkan.

Uang dapat menjadi sumber ketidakpuasan yang potensial jika jumlahnya jauh dari yang diharapkan, imbalan dapat dipakai sebagai dorongan atau motivasi pada suatu tingkat perilaku dan prestasi dan dorongan pemilihan organisasi sebagai tempat kerja.

2. Persepsi Kepala Bagian Promosi Kesehatan /Pengelola Program Jampersal Terhadap Program Jampersal

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Kepala Bagian Promosi Kesehatan/pengelola program jampersal di Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo mengatakan bahwa Program Jampersal merupakan Program Pemerintah Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 yang diciptakan oleh pemerintah sebagai bentuk dari tanggung jawab pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dibidang kesehatan Untuk mencapai program MDGs Point ke-4 dan ke-5. Oleh karenanya jampersal dimaksudkan untuk memberikan pembiayaan pemeriksaan dari kehamilan persalinan masa nifas dan pelayanan KB.

Melalui Program Jampersal diharapkan hambatan biaya bagi ibu untuk mengakses fasilitas dan tenaga kesehatan terpecahkan sehingga angka kematian ibu dan anak menurun. Jumlah kematian ibu Hamil, Ibu bersalin maupun ibu nifas di Kabupaten

Gorontalo pada tahun 2011 mencapai 16 kasus (250/100.000 KH) di tahun 2012 terjadi penurunan mencapai 15 kasus (244/100.000 KH) hal ini jauh dari target MDGs tahun 2015 yaitu 102/100.000 KH. Penyebab kematian ini sangat beragam antara lain eklamsia, perdarahan, infeksi dan masalah lingkungan maupun tingkat kesadaran ibu itu sendiri.

Untuk program Jampersal di Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo menurut Kabag Promkes baru dapat dilaksanakan

pada bulan Agustus 2011 dengan alokasi dana Rp. 2.992.557.000 Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan jumlah sasaran sebanyak 2.776 ibu hamil, dana tersebut disalurkan ke dua puluh satu puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo. Kemudian pada tahun 2012 alokasi dana jampersal meningkat menjadi Rp 4.006.867.000 (Empat Milyar Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan jumlah sasaran sebanyak 3.406 ibu hamil dengan Besarana dana terserap sebesar 60% dan pada tahun 2012 dana terserap Rp. 3.358.416.400 atau sebesar 77,5%.

Menurut kabag Promkes banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo untuk mensukseskan program jampersal tersebut yakni mulai dari sosialisasi yang gencar dilakukan di 21 Puskesmas di wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo baik pada para bidan desa dan BPS dan masyarakat. Sebagian besar Bidan yang mau bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan Program Jampersal ada beberapa BPS yang tidak mau melaksanakan program jampersal tersebut.

Bidan merasa tarif biaya untuk jampersal rendah dibandingkan dengan biaya di tempat praktek mereka, namun jangan lupa kata Kabag Promkes *“Kita ini petugas Kesehatan Pelayan masyarakat, kita sudah digaji oleh Negara oleh karenanya seorang bidan sudah seharusnya menjalankan tugasnya yaitu melayani ibu hamil dan bersalin bukan hanya dilihat dari besarnya imbalan”*. Demikian Pula masih banyak masyarakat yang tidak mau menggunakan program ini, padahal program ini sangat menguntungkan ibu karena biayanya gratis mulai dari pemeriksaan kehamilan, persalinan, nifas perawatan Bayi Baru Lahir dan pelayanan KB pasca persalinan.

Menurut beliau Klaim dana Jampersal oleh bidan baik bidan di Puskesmas dan BPS dilaksanakan di Dinas Kesehatan yaitu tiap bidan koordinator yang berada di Puskesmas memasukan rekapan biaya dan disetor di pengelola program Jampersal, yang menjadi kendala selama ini adalah pencairan dana klaim yang memakan waktu lama lebih dari triwulan. Hal ini disebabkan Dinas Kesehatan dalam hal ini pengelola Program harus menunggu Pemasukan biaya Klaim dari Puskesmas lainnya yaitu minimal satu kali klaim lima sampai dengan tujuh bahkan dua belas Puskesmas yang telah memasukan dana klaim tersebut. Selanjutnya dana klaim tersebut diajukan di Kas Daerah dan menunggu proses kurang lebih satu bulan dana Jampersal tersebut cair. Namun Alhamdulillah kata beliau seluruh biaya klaim yang diajukan oleh bidan terbayarkan semuanya.

Dinas Kesehatan perlu melakukan suatu supervisi sebagai upaya untuk memberikan pembinaan dan pengarahan dalam pelaksanaan Jampersal kepada bidan sekaligus mendengarkan keluhan tentang masalah pelaksanaan Jampersal dan memberikan petunjuk serta saran dalam mengatasi masalah. Supervisi dilakukan untuk melihat kendala- kendala yang dihadapi bidan dalam pelaksanaan jampersal. Pembinaan dapat dilakukan secara berkala dan berkesinambungan meliputi pemantauan, pembinaan dan pemecahan masalah serta tindak lanjut. Sesuai Permenkes nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang petunjuk teknik jampersal mengenai kewajiban Tim Pengelola Jampersal bahwa harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, dkk., 2013. *Pelaksanaan Program Jamninan Persalinan di*

- Dinas Kesehatan Kabupaten Buol.
Jurnal AKK FKM, Universitas
Hasanuddin Makassar
- Anggorodi Rina. 2006. *Dukun Bayi dalam Persalinan Oleh Masyarakat Indonesia*. Journal Makara Kesehatan. Vol.13 No.1 Juni 2009: 9-14
- Arista ., 2012. *Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam Millenium Development Goals (MDGs)*. Nuha Medika Yogyakarta.
- Apriyanti Putri, dkk,. 2011. *Gambaran Tingkat Kepuasan Ibu Bersalin Tentang Pelayanan Persalinan Program Jampersal di BPM Yulia Kota Semarang*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Departemen Kesehatan Indonesia,. 2012. *Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta.
- Diana Irine,. 2009. *Manajemen Pemasaran Usaha Kesehatan*. Nuha Medika Yogyakarta.
- Emzir,.2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan Analisis Data*. PT Rajagrafindo Persada Jakarta.
- Hastuti,.2011. *Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Kota Pekanbaru*. Jurnal Kesehatan.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia,. 2011. *Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan*. Jakarta.
- Muninjaya,.2004. *Aspek Strategis Manajemen Rumah Sakit*. Andi Offset Yogyakarta.
- Noorhidayah,.2013. *Motivasi Keterlibatan Bidan Praktek Swasta Terhadap Program Jampersal di Kota Banjarmasin Prov.Kalsel*. Jurnal Stikes Sari Mulia.
- Notoatmodjo Soekidjo,.2012. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta Jakarta.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo,. 2012. *Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo*.
- Primanita,.2010. *Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan di PKM dan Jaringannya Peserta Jamkesmas di Kab. Baturaja Barat*. Tesis FKM UNS
- Wioyono Djoko,.2000. *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan*. Vol 1. Airlangga University Press. Surabaya

